

Kontribusi Muhammadiyah dalam Penguatan Demokrasi dan Stabilitas Pemerintahan di Indonesia

Sugeng Aji Prasetyo¹, Zayyati Etwina²

¹Universitas Muhammadiyah Tangerang, sugengajiprasetyo@gmail.com,

²Universitas Muhammadiyah Tangerang, z.winasdm2024@gmail.com,

ARTICLE INFO

Keywords:

*Muhammadiyah,
Democracy,
Stability*

Article history:

Received 2024-12-12

Revised 2024-12-13

Accepted 2024-12-13

Corresponding Author:

*Sugeng Aji Prasetyo
Universitas Muhammadiyah
Tangerang;
sugengajiprasetyo@gmail.com*

CopyRight:

*This is an open access article under
the [CC BY-NC-SA](#) license.*



ABSTRACT

This study aims to discuss Muhammadiyah's contribution to strengthening democracy and government stability in Indonesia. As the largest Islamic organization in Indonesia, Muhammadiyah plays a role through political education, strengthening civil society, and advocating policies that support good governance. In addition, Muhammadiyah mediates social conflicts and maintains the value of moderation, which contributes to social harmony. With the principles of moderation and neutrality, Muhammadiyah has succeeded in maintaining a balance between constructive criticism of the government and collaboration in national development. This study emphasizes the importance of Muhammadiyah's role as a major actor in realizing inclusive democracy and government stability in Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kontribusi Muhammadiyah dalam penguatan demokrasi dan stabilitas pemerintahan di Indonesia. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah berperan melalui pendidikan politik, penguatan masyarakat sipil, dan advokasi kebijakan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, Muhammadiyah menjadi mediator konflik sosial dan penjaga nilai moderasi, yang berkontribusi pada harmoni masyarakat. Dengan prinsip moderasi dan netralitas, Muhammadiyah berhasil menjaga keseimbangan antara kritik konstruktif terhadap pemerintah dan kolaborasi dalam pembangunan nasional. Studi ini menegaskan pentingnya peran Muhammadiyah sebagai aktor utama dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan stabilitas pemerintahan di Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagai landasan utama. Dalam perjalanan sejarahnya, demokrasi Indonesia telah mengalami dinamika yang penuh tantangan, termasuk upaya menjaga stabilitas pemerintahan di tengah keragaman budaya, agama, dan politik. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan demokrasi dan stabilitas pemerintahan.

Muhammadiyah, yang berdiri sejak tahun 1912, tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan di bidang pendidikan, kesehatan,

dan sosial kemasyarakatan. Selain itu, organisasi ini juga turut terlibat dalam isu-isu kebangsaan yang lebih luas, termasuk dalam mendukung nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik. Prinsip moderasi Islam yang dianut Muhammadiyah menjadi landasan dalam menyuarakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan.

Muhammadiyah telah berkomitmen untuk memajukan kehidupan bangsa melalui prinsip Islam berkemajuan. Salah satu kontribusinya yang signifikan adalah peran aktif dalam mendukung nilai-nilai demokrasi, seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Muhammadiyah juga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses politik secara aktif, baik melalui pendidikan politik maupun advokasi kebijakan publik (Effendy, 2003).

Selain itu, kontribusi Muhammadiyah dalam menjaga stabilitas pemerintahan terlihat dari upaya organisasi ini untuk menjadi penengah dalam konflik sosial-politik. Pendekatan moderasi yang diusung Muhammadiyah memungkinkan terciptanya ruang dialog yang inklusif di tengah perbedaan pendapat di masyarakat. Dalam beberapa momen penting sejarah bangsa, seperti reformasi tahun 1998, Muhammadiyah mengambil posisi strategis untuk mendukung transisi demokrasi yang damai dan berkeadilan (Nashir, 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Muhammadiyah dalam penguatan demokrasi dan stabilitas pemerintahan di Indonesia. Fokus kajian mencakup peran Muhammadiyah dalam menciptakan ruang dialog yang inklusif, mendukung pendidikan politik masyarakat, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mengancam stabilitas nasional. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran strategis Muhammadiyah dalam memperkuat fondasi demokrasi Indonesia sekaligus menjaga keutuhan dan stabilitas negara.

Kajian ini menjadi relevan mengingat peran organisasi masyarakat sipil, seperti Muhammadiyah, semakin krusial dalam mendampingi pemerintah untuk menghadapi dinamika sosial-politik yang kompleks. Dengan menggali lebih dalam kontribusi Muhammadiyah, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan sinergi antara masyarakat sipil dan pemerintah dalam memajukan demokrasi yang sehat dan stabilitas pemerintahan yang berkelanjutan.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Penelitian ini dikatakan sebuah penelitian kepustakaan karena pengumpulan datanya didasarkan pada jurnal-jurnal terkait dan pendapat para ahli tentang kontribusi muhammadiyah dalam penguatan demokrasi dan stabilitas pemerintahan di indonesia.

3. TEMUAN DAN DISKUSI

Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi dan menjaga stabilitas pemerintahan. Organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 ini tidak hanya terlibat dalam kegiatan keagamaan dan sosial, tetapi juga dalam memberikan sumbangsih besar terhadap dinamika politik dan pemerintahan negara. Kontribusi Muhammadiyah dalam penguatan demokrasi dan stabilitas pemerintahan dapat dilihat melalui beberapa aspek penting, antara lain melalui peran dalam pendidikan, politik, pemberdayaan sosial-ekonomi, dan pengembangan prinsip moderasi beragama. Dengan prinsip "Islam

Berkemajuan" yang mendorong nilai-nilai moderat, inklusif, dan berbasis pada keadilan sosial, Muhammadiyah berkontribusi dalam berbagai bidang yang mendukung penguatan sistem demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia.

3.1. Peran Muhammadiyah dalam Penguatan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi masyarakat yang luas dan kesadaran politik yang tinggi. Muhammadiyah melalui berbagai lembaga pendidikan dan dakwahnya berupaya untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Berikut ini adalah peran-peran Muhammadiyah dalam penguatan demokrasi di Indonesia :

a. Pendidikan Politik dan Kesadaran Demokrasi

Muhammadiyah melalui institusinya, seperti sekolah, perguruan tinggi, dan majelis-majelis kajian, menyebarkan nilai-nilai demokrasi, seperti musyawarah, keadilan, dan partisipasi publik. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran politik warga untuk berkontribusi dalam proses demokrasi secara sehat. Muhammadiyah juga mendorong umat Islam untuk aktif dalam bidang politik dan pemerintahan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam moderat (Rustam et al., 2024). Muhammadiyah percaya bahwa partisipasi politik yang sehat dan etis merupakan salah satu cara untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Hilmy, 2012). Namun, Muhammadiyah juga menekankan bahwa politik harus dijalankan dengan integritas, menghindari korupsi, dan tidak menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi, Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk bersikap proaktif dan adaptif.

Selain itu, Muhammadiyah juga secara konsisten mendorong pendidikan politik yang inklusif melalui berbagai platform, seperti pengajian, seminar, dan kajian ilmiah. Organisasi ini membentuk kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban politik, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Melalui lembaga pendidikan, Muhammadiyah mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dalam kurikulum yang menanamkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Effendy, 2003).

Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar makruf nahi munkar dengan jalan memengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah juga menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar makruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban. Juga, Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota Persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi kemashlahatan bangsa dan negara (Tanthowi, 2019).

Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah berperan dalam membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Organisasi ini menjadi wadah yang netral bagi masyarakat untuk mendiskusikan isu-isu kebangsaan tanpa terikat oleh afiliasi politik tertentu. Peran ini terlihat pada masa reformasi 1998, di mana Muhammadiyah secara aktif mendukung perubahan menuju

sistem pemerintahan yang lebih demokratis (Nashir, 2010). Muhammadiyah secara aktif mendorong warga negara untuk menggunakan hak pilih mereka secara bijak dalam pemilu. Organisasi ini juga mendukung kampanye anti-politik uang dan pentingnya memilih pemimpin yang amanah.

b. Advokasi Kebijakan untuk Kesejahteraan Rakyat

Advokasi kebijakan merupakan salah satu wujud nyata kontribusi Muhammadiyah dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Advokasi kebijakan untuk kesejahteraan rakyat oleh Muhammadiyah merujuk pada upaya organisasi ini dalam memengaruhi dan mendorong pembuatan kebijakan publik yang berpihak kepada kesejahteraan sosial masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu dan marginal. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah memiliki peran yang signifikan dalam mengadvokasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat, memperbaiki akses terhadap pendidikan, kesehatan, keadilan sosial, serta meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Sebagai organisasi masyarakat sipil berbasis Islam, Muhammadiyah melakukan advokasi kebijakan dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial, keberpihakan kepada kelompok lemah (*mustad'afin*), dan nilai-nilai etika Islam. Sikap kritis namun konstruktif Muhammadiyah terhadap pemerintah menjadi salah satu cara menjaga stabilitas pemerintahan (Effendy, 2003).

Muhammadiyah terlibat aktif dalam mendorong kebijakan yang memperjuangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat, terutama kelompok miskin dan terpinggirkan. Advokasi ini mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Muhammadiyah terlibat dalam pengembangan ekonomi umat melalui program pemberdayaan yang mendukung kesejahteraan sosial. Ini membantu menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang penting untuk kelangsungan demokrasi yang sehat. Muhammadiyah mendukung usaha kecil dan menengah, serta berbagai program ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Prinsip-prinsip seperti zakat sedekah dan keadilan distributif menjadi landasan dalam program-program ekonomi yang dianjurkan oleh Muhammadiyah, dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umum. Berbagai lembaga di bawah Muhammadiyah, seperti Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZISMU), turut berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial. Melalui pendidikan, sosial, politik, ekonomi, dan dialog antarumat beragama, Muhammadiyah berperan aktif dalam membangun masyarakat yang seimbang, toleran dan maju secara kolektif (Aliyah & Parhati, 2020).

Muhammadiyah sering memberikan masukan kepada pemerintah dalam perumusan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan hak-hak sosial. Kritik dan saran yang disampaikan oleh Muhammadiyah berkontribusi pada perbaikan kebijakan publik yang lebih inklusif dan adil.

c. Moderasi dalam Demokrasi

Moderasi Muhammadiyah dalam Demokrasi mengacu pada upaya Muhammadiyah untuk mendorong nilai-nilai keseimbangan, toleransi, dan inklusivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam konteks sistem demokrasi Indonesia. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menekankan pentingnya prinsip *wasathiyah* atau

moderasi yang menghindari ekstremisme agama dan politik. Prinsip ini mengajarkan umat Islam untuk mengikuti jalan tengah yang mengutamakan kedamaian, saling menghormati, dan menghargai perbedaan, baik dalam hal agama, etnis, maupun pandangan politik. Dalam konteks demokrasi, Muhammadiyah berperan aktif dalam memperjuangkan kebebasan beragama, pluralisme, dan keadilan sosial. Organisasi ini juga mendorong partisipasi politik yang sehat dengan mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan berdasarkan politik identitas atau sektarian. Muhammadiyah mempromosikan moderasi sebagai nilai inti dalam demokrasi. Hal ini tercermin dalam sikap organisasi yang tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu, tetapi tetap berkontribusi melalui advokasi kebijakan yang mendukung kepentingan rakyat. Sikap ini memberikan ruang bagi Muhammadiyah untuk menjadi pengawas yang independen terhadap jalannya pemerintahan dan demokrasi di Indonesia (Burhani, 2016).

Lebih jauh, Muhammadiyah aktif dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan mendukung penguatan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Muhammadiyah juga berperan dalam meredakan polarisasi sosial yang sering kali terjadi dalam konteks politik Indonesia dengan mengedepankan dialog antarumat beragama dan antarbudaya. Selain itu, Muhammadiyah secara konsisten mengedukasi umat Islam untuk menjauhi radikalisme dan kekerasan atas nama agama, serta mengajarkan Islam yang moderat dan damai. Dalam menghadapi tantangan demokrasi, seperti radikalisme agama, polarisasi politik, dan ketidakadilan sosial, Muhammadiyah berkomitmen untuk terus memperkuat nilai-nilai demokrasi yang inklusif dan memperjuangkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Sebagai organisasi yang moderat, Muhammadiyah berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial-politik Indonesia dan memastikan bahwa demokrasi di negara ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan.

3.3. Peran Muhammadiyah dalam Menjaga Stabilitas Pemerintahan

Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Sejak didirikan pada tahun 1912, Muhammadiyah telah aktif dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial, yang semuanya berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. Melalui pendekatan yang moderat dan inklusif, Muhammadiyah berupaya menciptakan harmoni di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Selain itu, Muhammadiyah juga sering terlibat dalam dialog dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat mendukung kesejahteraan rakyat dan menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, peran Muhammadiyah tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga mencakup kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa. Berikut adalah peran-peran Muhammadiyah dalam menjaga stabilitas pemerintahan di Indonesia:

a. Mediator Konflik Sosial

Muhammadiyah memiliki peran signifikan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik sosial, yang secara langsung berkontribusi pada stabilitas pemerintahan. Dengan pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin dan semangat kebangsaan, Muhammadiyah sering hadir sebagai jembatan dialog antara pihak-pihak yang bertikai. Organisasi ini

mengedepankan musyawarah, pendidikan perdamaian, dan upaya rekonsiliasi untuk meredam potensi konflik yang dapat mengganggu harmoni masyarakat dan kestabilan politik. Melalui berbagai lembaga dan jaringan komunitasnya, Muhammadiyah aktif membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya toleransi dan kerja sama lintas kelompok demi tercapainya kehidupan bermasyarakat yang adil dan damai, yang mendukung kelangsungan pemerintahan yang stabil dan kuat. Muhammadiyah sering bertindak sebagai penengah dalam berbagai konflik sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan (Burhani, 2016). Muhammadiyah mendorong dialog antar kelompok yang berkonflik untuk menyelesaikan perbedaan secara damai. Contoh peran ini terlihat dalam berbagai konflik horizontal di wilayah Indonesia, di mana Muhammadiyah mengedepankan prinsip Islam rahmatan lil 'alamin untuk menciptakan perdamaian.

b. Penyedia Layanan Sosial

Muhammadiyah memainkan peran penting sebagai penyedia layanan sosial yang mendukung stabilitas pemerintahan melalui berbagai program kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui lembaga-lembaga sosialnya, seperti Rumah Sakit Muhammadiyah, sekolah-sekolah, dan panti asuhan, Muhammadiyah secara langsung membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, Muhammadiyah turut mengurangi ketimpangan sosial yang dapat memicu ketidakstabilan. Selain itu, melalui kegiatan sosial ini, Muhammadiyah memperkuat jaringan solidaritas antarwarga negara, mempromosikan rasa tanggung jawab bersama dalam membangun bangsa, serta mendukung terciptanya stabilitas sosial yang pada gilirannya mendukung kelangsungan pemerintahan yang aman dan damai. Melalui berbagai lembaga yang dikelolanya, Muhammadiyah membantu pemerintah dalam menyediakan layanan sosial yang mendukung stabilitas masyarakat (Suyatno, 2019). Berikut ini adalah beberapa lembaga layanan sosial yang dikelola oleh Muhammadiyah :

- **Layanan kesehatan**
Layanan kesehatan melalui ratusan rumah sakit dan klinik Muhammadiyah berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat, yang menjadi fondasi stabilitas sosial. Layanan kesehatan yang baik membantu menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan produktif. Menurut (Lorinda, 2022) melalui rumah sakit dan klinik yang dimiliki Muhammadiyah, organisasi ini tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tetapi juga berupaya untuk menjaga akses kesehatan yang adil bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang perbedaan agama atau suku.
- **Layanan Pendidikan**
Muhammadiyah telah berperan besar dalam pembangunan pendidikan Islam di Indonesia. Organisasi ini telah menyediakan pendidikan Islam kepada masyarakat luas melalui pembentukan sekolah Muhammadiyah di seluruh negeri. Sekolah Muhammadiyah tidak hanya mengajarkan materi keagamaan, tetapi juga mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum untuk membentuk generasi yang komprehensif. Selain itu, Muhammadiyah secara aktif berpartisipasi dalam pembuatan program

pendidikan Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan Muhammadiyah mengajarkan nilai-nilai keadilan sosial, menghormati keberagaman, dan membuat lingkungan belajar yang inklusif. Muhammadiyah berpendapat bahwa pendidikan adalah sarana untuk menyiapkan pribadi seseorang untuk menghadapi masalah di masa sekarang dan di masa depan. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang efektif harus didasarkan pada kondisi masyarakat saat ini dan untuk mengantisipasi masa depan. Perubahan lingkungan bukan hanya tantangan tetapi juga peluang, yang harus dihadapi dengan cara yang tepat untuk memberikan nilai tambahan (Sugiharto et al., 2024). Institusi pendidikan Muhammadiyah, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, memberikan akses pendidikan berkualitas kepada masyarakat luas, yang berdampak pada pengurangan kesenjangan sosial.

- Layanan Sosial Panti Asuhan

Muhammadiyah, melalui panti asuhannya, berperan penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dengan memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan perhatian. Panti asuhan Muhammadiyah tidak hanya memberikan tempat tinggal, tetapi juga pendidikan, pembinaan karakter, dan keterampilan untuk mempersiapkan generasi muda yang berkualitas. Dengan menyiapkan anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang baik, Muhammadiyah turut menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan berakhlak, yang merupakan pilar penting dalam pembangunan negara. Melalui layanan sosial ini, Muhammadiyah membantu mengurangi masalah sosial, seperti pengangguran dan kriminalitas, yang seringkali berakar dari kurangnya perhatian terhadap anak-anak yang kurang beruntung. Dengan demikian, panti asuhan Muhammadiyah turut berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih stabil dan mendukung kelangsungan pemerintahan yang harmonis dan sejahtera.

- c. Dukungan terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Muhammadiyah aktif dalam mendorong prinsip good governance untuk menjaga kredibilitas dan stabilitas pemerintahan (Ali, 2005). Organisasi ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam berbagai kebijakan pemerintah. Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan HAM-nya sering memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan rakyat.

- d. Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan

Muhammadiyah berperan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendekatan yang menekankan pada toleransi dan kebhinekaan. Muhammadiyah sering mengadakan kegiatan kebangsaan yang bertujuan untuk mempererat hubungan antarumat beragama dan kelompok sosial. Organisasi ini juga terus mendorong internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- e. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Muhammadiyah turut menjaga stabilitas pemerintahan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan

ekonomi dan bantuan sosial (Ali, 2005). Organisasi ini mengelola berbagai koperasi dan program pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan UMKM dan pelatihan keterampilan. Dengan membantu mengurangi kesenjangan sosial, Muhammadiyah berkontribusi pada stabilitas sosial yang berpengaruh pada stabilitas pemerintahan.

3.3. Kolaborasi dengan Pemerintah

Kolaborasi antara Muhammadiyah dan pemerintah dalam menjaga stabilitas pemerintahan di Indonesia mencakup berbagai bidang penting. Berikut adalah beberapa contoh utama dari kolaborasi tersebut:

a. Pendidikan

Muhammadiyah bekerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui jaringan sekolah dan universitas yang luas. Kolaborasi ini membantu mencerdaskan bangsa dan menanamkan nilai-nilai demokrasi serta kewarganegaraan kepada generasi muda.

b. Kesehatan

Muhammadiyah mendirikan rumah sakit dan klinik yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas. Ini membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan stabil.

c. Penanggulangan Bencana

Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam penanggulangan bencana dan rehabilitasi pasca bencana. Kolaborasi ini memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap bencana alam, memperkuat solidaritas sosial dan stabilitas masyarakat.

d. Advokasi Kebijakan Publik

Muhammadiyah sering memberikan saran dan kritik konstruktif kepada pemerintah mengenai berbagai kebijakan publik. Kritik ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.

e. Program Sosial dan Kemanusiaan

Muhammadiyah menjalankan berbagai program sosial dan kemanusiaan yang mendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Program-program ini mencakup bantuan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi untuk kelompok masyarakat yang kurang mampu.

3.4. Tantangan dan Peluang

Meskipun Muhammadiyah memiliki kontribusi yang besar, tantangan tetap ada, seperti bagaimana menjaga independensi organisasi di tengah tarik-menarik kepentingan politik dan bagaimana merespons dinamika globalisasi yang memengaruhi proses demokrasi lokal. Peluangnya terletak pada kemampuan Muhammadiyah untuk memanfaatkan teknologi dan kolaborasi lintas sektor untuk terus memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan pendekatan yang inklusif dan

berbasis nilai-nilai Islam, Muhammadiyah menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung demokrasi yang sehat dan stabilitas pemerintahan di Indonesia.

a. Tantangan

- **Revitalisasi Kelembagaan**
Muhammadiyah perlu memastikan bahwa struktur kelembagaannya tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Ini termasuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan memastikan kader-kader muda memiliki kemampuan adaptasi dan inovasi yang tinggi.
- **Perubahan Sosial dan Budaya**
Perubahan sosial dan budaya yang cepat menuntut Muhammadiyah untuk terus menyesuaikan diri. Ini termasuk menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.
- **Teknologi dan Digitalisasi**
Kemajuan teknologi dan digitalisasi memerlukan adaptasi dalam cara Muhammadiyah beroperasi dan berkomunikasi. Ini termasuk penggunaan teknologi untuk pendidikan, kesehatan, dan advokasi kebijakan.
- **Politik Dinasti dan Penurunan Demokrasi**
Muhammadiyah harus menghadapi tantangan politik seperti politik dinasti dan penurunan kualitas demokrasi. Organisasi ini perlu terus berperan sebagai pengawas dan pengkritik yang konstruktif untuk memastikan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

b. Peluang

- **Pendidikan Inklusif**
Dengan jaringan sekolah dan universitas yang luas, Muhammadiyah memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang berpendidikan tinggi dan berwawasan luas.
- **Kolaborasi dengan Pemerintah**
Muhammadiyah memiliki peluang untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan bencana. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas program-program yang dijalankan.
- **Pemberdayaan Ekonomi**
Melalui program-program filantropi dan pemberdayaan ekonomi, Muhammadiyah dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ini termasuk program pelatihan kejuruan dan kewirausahaan.
- **Advokasi Kebijakan Publik**
Muhammadiyah memiliki peluang untuk terus berperan dalam advokasi kebijakan publik yang pro-rakyat. Ini termasuk memberikan saran dan kritik konstruktif kepada pemerintah untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.

4. KESIMPULAN

Muhammadiyah telah memainkan peran strategis dalam penguatan demokrasi di Indonesia dengan mengedepankan pendidikan politik dan kesadaran demokrasi. Melalui lembaga pendidikan dan dakwahnya, Muhammadiyah menyebarkan nilai-nilai demokrasi, seperti musyawarah, keadilan, dan partisipasi publik, untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Organisasi ini juga mendorong partisipasi politik yang sehat, dengan mengajak umat Islam untuk berperan aktif dalam politik sambil berpegang pada prinsip Islam moderat. Selain itu, Muhammadiyah turut mengadvokasi kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, terutama kelompok miskin dan marginal, untuk menciptakan keadilan sosial.

Selain dalam penguatan demokrasi, Muhammadiyah juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas pemerintahan di Indonesia. Melalui pendekatan moderat, Muhammadiyah bertindak sebagai mediator dalam konflik sosial dan menyediakan layanan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Organisasi ini aktif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Muhammadiyah juga memperkuat nilai-nilai kebangsaan dengan mengedepankan toleransi dan kebhinekaan, serta internalisasi Pancasila sebagai dasar negara.

Dengan prinsip moderasi, Muhammadiyah membantu meredakan polarisasi sosial dan politik yang sering terjadi di Indonesia. Organisasi ini mempromosikan prinsip wasathiyah (moderat), yang menghindari ekstremisme dan mendorong dialog antar kelompok yang berbeda. Meskipun menghadapi tantangan seperti perubahan zaman dan dinamika politik, Muhammadiyah memiliki peluang besar untuk terus memperkuat kontribusinya dalam pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan demokrasi. Dengan terus berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat, Muhammadiyah dapat membantu menciptakan stabilitas sosial dan pemerintahan yang lebih baik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2005). Muhammadiyah dan Pancasila: Dalam Perspektif Politik dan Sosial. Yogyakarta: UGM Press.
- Aliyah, S. D., & Parhati, L. N. (2020). Pembelajaran Agama Islam dalam Perkembangan Peradaban Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia (JPAAI)*, 1(2). <https://doi.org/10.37251/jpaa.v1i2.103>
- Ardianto, Aan. (2022). Relasi Muhammadiyah dengan Pemerintah, Kritis sekaligus Kontribusi-Partisipasi untuk Pemenuhan Hak Warga Bangsa. Website: <https://muhammadiyah.or.id/2023/03/relasi-muhammadiyah-dengan-pemerintah-kritis-sekaligus-kontribusi-partisipasi-untuk-pemenuhan-hak-warga-bangsa/>
- Burhani, A. N. (2016). *Islam Nusantara as a Promising Response to Religious Intolerance and Radicalism*. ISEAS Publishing
- Effendy, B. (2003). *Islam and the State in Indonesia*. Ohio University Press.
- Fauzia, Alysya., Nazila, Nur Alvisyahri Nazila., & Oktroyani. (2024). Pandangan Muhammadiyah tentang Islam Moderat untuk Kemajuan Peradaban Islam di Indonesia. *Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 2(3), 141-153.
- Hidayat, Taufik. (2024). Muhammadiyah di Era Kontemporer: melawan Penurunan Demokrasi dan Politik Dinasti. Website: <https://www.kompasiana.com/taufik271003/667513bbc925c42918676262/muhammad-iyah-di-era-kontemporer-melawan-penurunan-demokrasi-dan-politik-dinasti>

- Hilmy, M. (2012). QUO-VADIS ISLAM MODERAT INDONESIA? Menimbang Kembali Modernisme Nahdaltul Ulama da Muhammadiyah. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36(2). <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i2.127>
- Lorinda, R. (2022). Muhammadiyah dan Moderatisme Islam Indonesia. *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyahan (JASIKA)*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/jasika.v2i2.43>
- Nashir, H. (2010). Muhammadiyah Gerakan Pembaruan. *Suara Muhammadiyah*.
- Reggina, Elfarah. (2023). Peran Muhammadiyah dalam Politik Pemerintahan Indonesia. Website:<https://www.kompasiana.com/elfarah94611/640497c660e28e208c40d4a2/peran-muhammadiyah-dalam-politik-pemerintahan-indonesia>
- Rustam, M.B., Abdillah Subarkah, M., Andy, M., Ryandini, Y., Lestari, D., & Arini, D. A. S. (2024). The Muhammadiyah Movement in Social and Politics. *Journal of Islamic Studies (JEIS)*, 1(1), 1-7. <https://doi.org/10.62083/jpy7mz29>
- Sugiharto., Suharyanto, Mohamad., Rahmatullah, Dadan Rizki., Nurmuhammad, Riezky Zulfikar. (2024). Peran Muhammadiyah dalam Upaya Pengembangan Pendidikan dan Ekonomi Islam di Indonesia, 2(3), 110-116.
- Suyatno, et al. (2019). "The Contribution of Muhammadiyah in Indonesia's Educational Reform". *Journal of Social Sciences and Humanities*.
- Tanthowi, Pramono U. (2019). Muhammadiyah dan Politik: Landasan Ideologi Bagi Artikulasi Konstruktif. *MAARIF*, 14(2). <https://doi.org/10.47651/mrf.v14i2.65>